

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

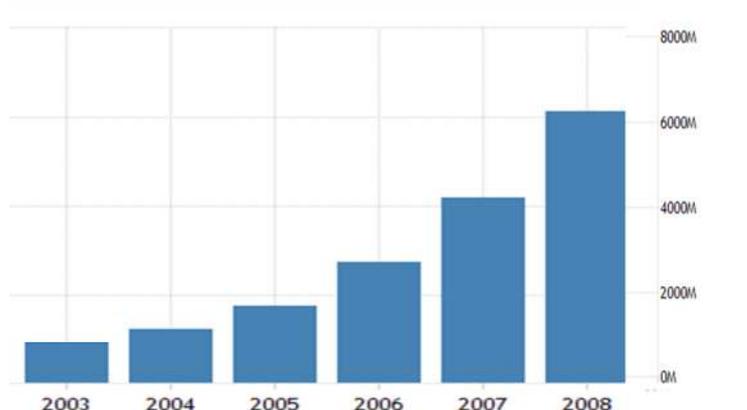
Pertemuan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Agustus 2016 menjadi titik balik meningkatnya hubungan bilateral antara Turki dan Rusia. Secara historis hubungan Turki dan Rusia tidak baik. Sejak abad ke-17 hingga abad ke-20 Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Rusia merupakan rival dalam Perang Rusia-Turki, menjadikan perang tersebut sebagai salah satu konflik militer paling lama yang terjadi di Eropa (Dowling, 2014). Pada rentang waktu tersebut, tahun 1853-1856 juga terjadi perang antara Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Rusia yakni Perang Krimea. Perang Krimea merupakan perang yang memperebutkan pengaruh di Semenanjung Balkan karena mayoritas masyarakat Balkan yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman menganut Kristen Ortodoks, agama resmi Kekaisaran Rusia. Perang Krimea juga merupakan ambisi Kekaisaran Rusia untuk mendapatkan akses Selat Bosphorus yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Mediterania (Kozelsky, 2012).

Hubungan tidak harmonis Turki dan Rusia berlanjut hingga era yang lebih maju. Pasca Perang Dunia II Rusia yang masih menjadi Uni Soviet menekan Turki untuk mengambil alih Selat Bosphorus, Selat Dardanella, dan beberapa wilayah Turki bagian Timur (Titov, 2015). Secara geopolitik, wilayah-wilayah tersebut penting bagi Uni Soviet sebagai akses penghubung ke negara-negara tetangga untuk meningkatkan kekuasaan. Lebih lanjut karena perairan di Uni Soviet kerap membeku akibat iklim dingin, maka Laut Hitam yang memiliki iklim sama sepanjang tahun dapat menjadi lokasi strategis bagi Uni Soviet untuk transit barang dan energi. Turki yang bertindak sebagai pihak netral saat Perang Dunia II secara ekonomi tidak mampu menghadapi kekuatan Uni Soviet. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Amerika Serikat (AS), yang merupakan rival Uni Soviet di Perang Dingin, untuk membantu Turki secara ekonomi dan militer melalui

Doktrin Truman. Doktrin Truman merupakan strategi AS untuk menangkal pengaruh komunisme Uni Soviet di Turki. Manifestasi Doktrin Truman di Turki berupa bantuan uang sejumlah US\$ 100 juta, persenjataan militer, dan pelatihan untuk modernisasi angkatan bersenjata Turki (Erdinçler, 2015). Namun, bantuan yang diberikan memiliki syarat yaitu AS membatasi Turki menggunakan dana bantuan tanpa seizin AS. Pemerintah Turki setuju dan menandatangani perjanjian Agreement on Aid to Turkey dengan AS pada 12 Juli 1947. Bantuan AS untuk Turki berlanjut melalui Marshall Plan dan selanjutnya meningkatkan hubungan Turki dengan AS. Hubungan baik Turki dan AS mendorong Turki untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization (NATO) tahun 1952.

Kedekatan Turki dan AS membuat hubungan bilateral Turki dengan Rusia stagnan. Namun, hubungan bilateral Turki-Rusia mulai menunjukkan peningkatan di bidang ekonomi sejak Presiden Erdogan menjadi Perdana Menteri Turki tahun 2003. Peningkatan hubungan ekonomi Turki-Rusia ditandai dengan dibangunnya pipa gas bawah laut oleh Rusia yang mengalir ke Turki (Titov, 2015). Tahun 2004 Presiden Putin melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Turki untuk meningkatkan kerja sama multidimensional. Dari tahun 2003 sampai dengan 2008 angka impor Rusia terhadap Turki terus mengalami peningkatan.

Grafik 1. Peningkatan nilai impor Rusia terhadap Turki tahun 2003-2008



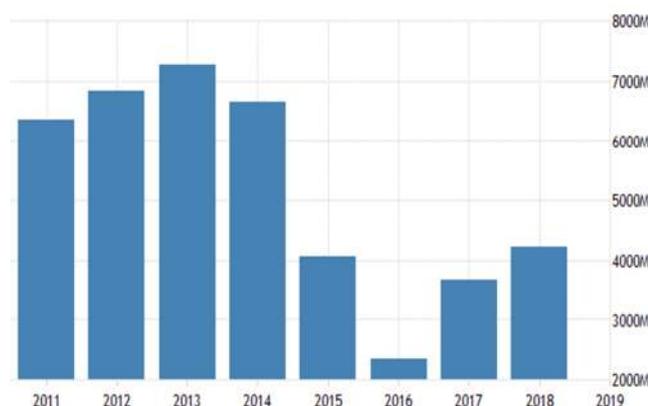
Sumber: Trading Economics

Hingga pada tahun 2010 kedua negara sepakat membentuk High-Level Russian-

Turkish Cooperation Council di bidang perdagangan dan ekonomi. Kesepakatan tersebut menjadi komponen paling penting bagi hubungan bilateral Turki-Rusia (Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, tt.). Tujuan dibentuknya High-Level Russian-Turkish Cooperation Council adalah untuk mengembangkan strategi dalam meningkatkan hubungan Turki-Rusia, koordinasi perihal implementasi dari proyek-proyek yang telah disepakati, dan memberikan insentif bagi pengusaha di kedua negara.

Pada tahun 2014 Recep Tayyip Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki, namun satu tahun setelahnya hubungan Turki-Rusia kembali mengalami penurunan akibat perbedaan prinsip dalam menyikapi Perang Saudara di Suriah. Penurunan hubungan Turki-Rusia diikuti pula oleh penurunan nilai impor Rusia terhadap Turki.

Grafik 2. Penurunan nilai impor Rusia terhadap Turki tahun 2013-2016



Sumber: Trading Economics

Hubungan bilateral Turki-Rusia semakin memburuk pada tahun 2015. Tepatnya pada 24 November 2015, Turki menembak jatuh pesawat Rusia di perbatasan Turki-Suriah dengan alasan pesawat Rusia melanggar batas teritorial udara Turki meskipun telah diperingatkan sebanyak sepuluh kali (Al Jazeera, 2015). Atas tindakan Turki, Presiden Putin menjatuhkan sanksi bagi Turki antara lain membatasi impor barang dari Turki, melarang penerbangan dari dan ke Turki, melarang agen liburan Rusia melakukan perjalanan ke Turki, serta menarik

peraturan bebas visa Turki-Rusia. Lebih lanjut, pemerintah Rusia melarang perusahaan Turki yang berada di Rusia beroperasi dan melarang perusahaan Rusia mempekerjakan orang Turki (Kremlin, 2015a).

Atas sanksi dari Rusia, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada nilai impor Rusia terhadap Turki dari tahun 2015 ke 2016. Selain hubungan yang kembali tidak harmonis dengan Rusia, pada 15 Juli 2016 situasi politik domestik Turki mengalami gejolak akibat adanya upaya kudeta untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Erdogan oleh kelompok militer Turki. Meskipun upaya kudeta dapat digagalkan, namun kejadian tersebut berdampak pada jatuhnya 265 korban jiwa (Reuters, 2016a). Selain persoalan kudeta yang terjadi di Turki, Perang Saudara Suriah yang telah berlangsung dari tahun 2011 memberikan permasalahan baru untuk Turki. Tercatat hingga 1 Juni 2016, Turki menjadi negara penerima pengungsi Suriah terbesar yakni sejumlah 2,7 juta jiwa. Sedangkan pengungsi Suriah di negara lain seperti di negara-negara Uni Eropa sebanyak 750.000 jiwa dan di Mesir, Irak, Yordania, serta Lebanon jika disatukan hanya berjumlah 2,1 juta jiwa (National Audit Office, 2016).

Sejak Turki menembak jatuh pesawat Rusia tahun 2015, Presiden Putin telah meminta Presiden Erdogan meminta maaf namun Presiden Erdogan menolak. Hingga pada 9 Agustus 2016 secara tiba-tiba Presiden Erdogan mengunjungi Presiden Putin untuk membuka lembaran baru dan membangun kembali hubungan kedua negara atau dapat disebut sebagai *rapprochement* (Bushuev, 2016). Dari pertemuan Presiden Erdogan dan Presiden Putin tahun 2016, tidak hanya menghasilkan penghentian sanksi ekonomi oleh Rusia dan menguatkan kembali hubungan ekonomi yang sempat menurun, namun juga secara politik Presiden Erdogan menyatakan mendukung Rusia dalam konflik Suriah untuk melawan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Untuk menunjukkan dukungan, Presiden Erdogan menyatakan “Without Russia’s participation, it’s impossible to find a solution to the Syrian problem. Only in partnership with Russia we will be able to settle the crisis in Syria” (Hurriyet, 2016a). Padahal, sejak tahun 2011 Turki yang merupakan negara anggota NATO mengecam intervensi militer Rusia

di Perang Saudara Suriah (Barnes dan Lubold, 2015).

Setelah berabad-abad memiliki hubungan tidak harmonis dengan Rusia, kebijakan *rapprochement* yang dilakukan Presiden Erdogan di tengah konflik kawasan Eropa dan Timur Tengah tentu menggeser peta geopolitik internasional. Fenomena manuver politik Presiden Erdogan menjadi menarik diteliti untuk mencari motif dibalik keputusan Presiden Erdogan melakukan *rapprochement* dengan Rusia tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa Presiden Erdogan memilih untuk melakukan kebijakan *rapprochement* dengan Rusia pada tahun 2016, setelah sebelumnya menolak untuk meminta maaf kepada Rusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pilihan rasional yang melatarbelakangi pergeseran kebijakan luar negeri Turki dan signifikansi pengaruh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan *rapprochement* dengan Rusia tahun 2016.

1.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua kerangka pemikiran yang akan membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian dan membentuk logika berpikir dalam menjelaskan peran Presiden Erdogan dalam kebijakan *rapprochement* Turki-Rusia 2016. Adapun kerangka pemikiran yang akan digunakan adalah *rapprochement* sebagai kebijakan luar negeri dan teori persepsi yang dijelaskan pada sub-bab berikut.

1.4.1 *Rapprochement* sebagai Kebijakan Luar Negeri

Pada dasarnya sebuah negara memiliki kepentingan nasional yang ingin dicapai, untuk itu aktor pembuat kebijakan merumuskan kebijakan yang dianggap paling

efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil terbaik. Aktor pembuat kebijakan yang dimaksud seperti pemimpin negara atau presiden, menteri, dan birokrat pemerintahan. Yoshimichi Sato (2013) menyatakan jika setiap kebijakan yang diambil adalah pilihan paling rasional dan terbaik bagi aktor pembuat kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat dikontrol oleh aktor. Pilihan aktor pembuat kebijakan didasari oleh persepsi aktor yang telah melalui kalkulasi tertentu, dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi negara dalam mencapai kepentingannya. Felix E. Oppenheim (1987) menambahkan jika kepentingan nasional bagi aktor pembuat kebijakan dapat dibagi menjadi dua yakni kepentingan primer dan kepentingan sekunder. Kepentingan primer merupakan kepentingan yang ditujukan bagi keberlangsungan negara, sedangkan kepentingan sekunder merupakan kepentingan para pemimpin negara untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki.

Kepentingan nasional dapat berupa kepentingan politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan yang dimanifestasikan ke dalam kebijakan oleh aktor pembuat kebijakan. Salah satu cara negara mencapai hubungan yang lebih baik atau berdamai dengan negara lain ialah melalui *rapprochement*. Dalam Hubungan Internasional, *rapprochement* berasal dari istilah Bahasa Prancis yang berarti rujuk. Sebuah situasi dapat disebut *rapprochement* jika dua negara yang sebelumnya berkonflik kemudian berubah ke arah yang lebih harmonis dengan melakukan pendekatan (Goh, 2005). Selaras dengan definisi Evelyn Goh, Stephen McGlinchey (2017). mendefinisikan *rapprochement* sebagai pembuka jalan bagi perubahan pola hubungan dua negara secara perlahan yang sebelumnya bersifat konfliktual. Sebagai kebijakan luar negeri, *rapprochement* merupakan salah satu strategi diplomasi untuk menghilangkan permusuhan dan rasa tidak saling percaya antara satu negara dengan lainnya. Selain untuk mengembalikan hubungan menjadi harmonis, *rapprochement* juga menjadi pilihan kebijakan luar negeri agar dua negara yang telah memperbaiki hubungan dapat menggabungkan kekuatan untuk melawan musuh bersama dan mencapai kepentingan nasional masing-

masing (Luthi, 2010).

Penggunaan *rapprochement* sebagai kebijakan luar negeri dapat diterapkan oleh negara pada umumnya dimulai dengan membuat perjanjian atau pernyataan bersama antara dua negara yang berkonflik. Charles William Kegley & Shannon Lindsey Blanton (2010) dalam tulisannya “International Decision Making” merumuskan tahapan-tahapan menentukan kebijakan luar negeri ke dalam empat tahap. Tahap pertama yaitu *problem recognition and definition* atau melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada. Sebelum sebuah keputusan diambil, tentu saja hal pertama yang harus dilakukan ialah mengenali permasalahan baik dalam dinamika internasional maupun situasi domestik dengan memanfaatkan informasi sebaik-baiknya. Informasi yang dimaksud ialah fakta yang relevan terhadap suatu permasalahan, motif dari tindakan aktor lain, kemampuan aktor lain, tren yang ada di lingkungan internasional, dan lain sebagainya. Informasi yang terkumpul kemudian dianalisis hingga masuk ke tahap kedua yaitu *goal selection* atau menentukan tujuan apa yang ingin dicapai oleh aktor pembuat kebijakan dari permasalahan yang ada. Tujuan yang ingin dicapai tentunya sesuai dengan kepentingan nasional serta kemampuan negara dan aktor pembuat kebijakan. Tahap ketiga ialah *identification of alternatives* atau alternatif pilihan yang muncul serta mungkin untuk diimplementasikan berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan yang telah ditentukan. Dilakukan kalkulasi yang cermat mengenai untung-rugi alternatif pilihan dan prediksi jika nantinya pilihan akan diterapkan, selain itu sebuah pilihan yang akan diambil juga disesuaikan secara rasional dengan kemampuan negara. Hingga akhirnya masuk pada tahap terakhir yakni *choice* atau pilihan rasional yang telah diseleksi sebagai pilihan terbaik dari pilihan alternatif yang ada untuk membuat kebijakan, sehingga aktor pembuat kebijakan dapat mencapai tujuan secara maksimal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan *rapprochement* sebagai kebijakan luar negeri untuk menjelaskan pilihan rasional Presiden Erdogan dalam melakukan pendekatan kembali dan menggabungkan kekuatan dengan Rusia di tahun 2016 setelah sebelumnya hubungan kedua negara tidak harmonis. Penulis akan

menjabarkan *rapprochement* sebagai kebijakan luar negeri merupakan pilihan terbaik Presiden Erdogan untuk mencapai kepentingan nasional Turki secara maksimal.

1.4.2 Teori Persepsi

Teori persepsi merupakan penafsiran aktor pembuat kebijakan terhadap sebuah isu. Penafsiran didapatkan melalui fakta yang ada dan disesuaikan dengan nilai yang dianut oleh aktor pembuat kebijakan kemudian dimanifestasikan sebagai kebijakan luar negeri sebuah negara (Holsti, 2006). Fakta yang dimaksud merupakan data dan informasi mengenai situasi yang terjadi pada lingkungan domestik atau internasional, sedangkan nilai adalah aspek individual yang melekat pada diri pembuat kebijakan seperti pendidikan, pengalaman, dan pengaruh keluarga. Persepsi memberikan pengaruh yang signifikan bagi pembuatan kebijakan luar negeri terutama di negara yang memiliki sistem autokrasi, yang mana kekuasaan politik dipegang oleh satu orang.

Di negara yang menganut sistem autokrasi, peranan pemimpin memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembuatan kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat di Turki pada pemerintahan Presiden Erdogan. Meskipun Turki merupakan negara demokratis, namun sejak Erdogan menjadi presiden tahun 2014 pemerintahan Turki terpusat pada peran Erdogan sebagai pemimpin. Kecenderungan Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan menjadi negara autokrasi dapat dilihat sejak gagalnya kudeta tahun 2016. Sejak itu Presiden Erdogan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak demokratis seperti melakukan represi terhadap media, pihak oposisi, serta memblokir akses warga Turki terhadap sosial media seperti twitter, facebook, dan whatsapp (Bulman, 2016). Turki berubah dari negara demokrasi liberal gaya Uni Eropa menjadi *one-man autocracy* seperti yang banyak ditemui di negara-negara Timur Tengah (Cook, 2016). Puncaknya pada tahun 2018 melalui referendum konstitusi Turki, secara resmi Presiden Erdogan mengubah sistem pemerintahan Turki dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial mensentralisasi peran Presiden

Erdogan sebagai pembuat kebijakan, keadaan tersebut juga didukung oleh partai yang dibentuk Presiden Erdogan yakni Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) menduduki mayoritas posisi pemerintahan (Kirişci dan Toygür, 2019). Sebagai aktor sentral, persepsi Presiden Erdogan terhadap lingkungan dan isu yang ada sangat krusial bagi proses pembuatan kebijakan.

Teori persepsi dapat digunakan untuk menganalisis fenomena hubungan internasional menggunakan aktor pembuat kebijakan sebagai unit analisis. Sebelum persepsi aktor menjadi sebuah kebijakan, Holsti (2006) menjelaskan dua proses yang membentuk persepsi aktor pembuat kebijakan. Proses pertama yaitu proses langsung yang mana persepsi pembuat kebijakan dipengaruhi oleh nilai yang melekat dengan aktor pembuat kebijakan, persepsi aktor dibentuk melalui kepercayaan yang dimiliki meskipun kepercayaan tersebut bertentangan dengan informasi yang ada. Kepercayaan yang dimaksud adalah justifikasi aktor pembuat kebijakan terhadap persoalan yang terjadi berdasarkan nilai yang dianut. Kepercayaan dibangun oleh aspek pendidikan terkait pengetahuan dan kemampuan aktor dalam memahami situasi, sejarah kejadian di masa lalu yang dijadikan acuan, serta karakter individu. Karena persepsi dibentuk melalui kepercayaan, maka kebijakan dapat dibentuk tanpa melalui proses verifikasi dengan data dan fakta yang tersedia mengenai sebuah persoalan. Proses kedua adalah proses tidak langsung yang melibatkan tahapan lebih panjang yakni dilakukan *scanning*, *selecting*, *filtering*, *linking*, *reordering*, *organizing*, dan *reporting* pada informasi yang diterima aktor hingga akhirnya persepsi menjadi kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, teori persepsi menitikberatkan pembuatan kebijakan pada cara pandang aktor pembuat kebijakan terhadap suatu isu. Dalam penelitian ini, teori persepsi digunakan untuk menjelaskan proses pembuatan kebijakan luar negeri Turki yaitu melakukan *rapprochement* dengan Rusia tahun 2016 sebagai pilihan terbaik guna mencapai kepentingan nasional Turki berdasarkan persepsi Presiden Erdogan sebagai aktor sentral.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dalam penelitian ini penulis akan menguji dua hipotesis untuk menjawab rumusan masalah. Pertama, Presiden Erdogan memilih kebijakan *rapprochement* antara Turki-Rusia tahun 2016 untuk menggabungkan kekuatan dengan Rusia melawan musuh bersama yaitu ISIS. Kedua, kebijakan *rapprochement* Turki-Rusia tahun 2016 dipilih untuk mengamankan posisi Presiden Erdogan sebagai pemimpin dan mengembalikan stabilitas Turki pasca upaya kudeta militer 15 Juli 2016.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan hipotesis di atas penulis mengoperasionalkan konsep *rapprochement* yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

1.6.1.2 *Rapprochement*

Penulis menggunakan pengertian *rapprochement* dari Lorenz Luthi (2010) yang menjelaskan jika *rapprochement* adalah pilihan kebijakan luar negeri bagi dua negara untuk menggabungkan kekuatan baik ekonomi, militer, politik, dan lainnya demi melawan musuh bersama serta mencapai kepentingan nasional masing-masing. Dalam hal ini, hubungan Turki dan Rusia yang memburuk pasca penembakan pesawat menuju ke arah yang lebih baik karena Turki ingin menggabungkan kekuatan militer dengan Rusia untuk melawan kelompok teroris ISIS di Suriah. Selain itu Presiden Erdogan ingin mengembalikan kerja sama ekonomi dengan Rusia demi mengamankan posisi kepemimpinan dan mengembalikan stabilitas Turki.

1.6.2 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dari tahun 2014 ketika Recep Tayyip Erdogan terpilih sebagai Presiden Turki hingga tahun 2016 ketika Presiden Erdogan memutuskan untuk melakukan kebijakan *rapprochement* dengan Rusia.

Kebijakan *rapprochement* Turki-Rusia tidak hanya pada aspek perdagangan tapi juga meliputi aspek politik dan keamanan. Namun tidak menutup kemungkinan penulis juga akan memaparkan data di luar jangkauan tahun 2014 hingga 2016 untuk mendukung argumentasi penulis mengenai faktor-faktor yang mendorong Turki mengubah kebijakan luar negeri di tahun 2016.

1.6.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dalam buku dan media cetak/digital, arsip, dokumen, situs resmi pemerintah Turki, dan pernyataan resmi Presiden Erdogan. Fokus pencarian data dalam penelitian ini ditujukan pada pergeseran kebijakan luar negeri Turki pada pemerintahan Presiden Erdogan untuk melakukan *rapprochement* dengan Rusia yang sebelumnya tidak harmonis. Data sekunder yang telah didapat selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Guna mendukung argumen penelitian, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif data kemudian digunakan untuk identifikasi, menggambarkan, dan memahami fenomena yang dalam penelitian ini pergeseran kebijakan luar negeri Turki pada masa kepemimpinan Presiden Erdogan.

1.6.4 Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang diajukan, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif karena penulis berusaha menjelaskan fenomena sebab-akibat dengan menghubungkan antara dua variabel atau lebih yaitu hubungan antara situasi eksternal dan internal Turki dengan proses pergeseran kebijakan luar negeri yang rasional untuk mendekat ke Rusia. Tipe penelitian eksplanatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yakni menemukan penjelasan dengan melakukan identifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena pergeseran kebijakan Turki.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi dan metode penelitian. Bab kedua membahas tentang dinamika hubungan Turki-Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan dan Presiden Putin. Bab ketiga menjelaskan tentang pilihan Presiden Erdogan melakukan kebijakan *rapprochement* dengan Rusia tahun 2016 untuk menggabungkan kekuatan melawan ISIS guna menguji hipotesis pertama. Bab keempat menganalisis pengaruh persepsi Presiden Erdogan sehingga memilih melakukan *rapprochement* dengan Rusia untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin dan mengembalikan stabilitas Turki pasca percobaan kudeta 15 Juli 2016, guna menguji hipotesis kedua. Bab kelima berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian.